

ABSTRAK

PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA JAKSA PENUNTUT UMUM DENGAN MAJELIS HAKIM TENTANG DEFINISI LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 128/PID.B/2021/PNLIW)

Oleh
Indra Setiawan

Penganiayaan tidak hanya terjadi secara tunggal atau individu yang tidak saling mengenal dan diawali tidak adanya konflik diawal permasalahan atau tidak memiliki hubungan darah. Jika seseorang melakukan penganiayaan pada salah satu anggota tubuh orang lain, maka hukuman yang akan diterima oleh pelaku ialah perbuatan yang menimbulkan akibat yang sama dengan Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. salah satu Perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis yuridis dan non yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 ayat 1 dan Pasal 351 Ayat 2 KUHP dan untuk mengetahui tindak pidana penganiayaan dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis yuridis normatif terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 Ayat 1 dan Pasal 351 Ayat 2 KUHP yakni

Terkait dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yakni dilihat dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Hukuman yang diberikan bukan sebagai pembalasan melainkan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terkait dengan penganiayaan biasa dapat djerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

INDRA SETIAWAN

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dikarenakan adanya melarang anak terdakwa tersebut untuk melihat saksi korban yang sedang duduk diteras rumah saksi Sasta, mendengar cerita anaknya yang diperlakukan tidak baik oleh saksi korban kemudian terdakwa merasa emosi, dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah golok dengan panjang 50cm bergagang kayu terikat karet berwarna hitam dari balik pintu rumah terdakwa dan terdakwa langsung membawa golok tersebut dengan menggunakan tangan kanan

Kata Kunci: Pendapat, Hakim, Luka Berat, Tindak Pidana, dan Penganiayaan.

ABSTRACT

DIFFERENCES OF OPINION BETWEEN THE PUBLIC PROSECUTORS AND THE JUDGE ABOUT THE DEFINITION OF SEVERE INJURY IN THE CRIME OF MASSAGE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 128/PID.B/2021/PNLIW)

BY

Indra Setiawan

Persecution does not only occur in stumps or individuals who do not know each other and in the beginning there was no conflict at the beginning of the problem or were not related by blood. If a person commits maltreatment on a member of another person's body, then the punishment that will be received by the perpetrator is an act that has the same consequences as the consequences caused by the perpetrator's actions against the victim. One of the criminal acts regulated in the Criminal Code and often occurs and is experienced by humans in social life is a criminal act of persecution. Provisions that explain persecution are regulated in Articles 351-358 of the Criminal Code.

The purpose of this study is to find out and analyze how the juridical and non-juridical analysis of the criminal act of persecution in Article 351 paragraph 1 and Article 351 paragraph 2 of the Criminal Code and to find out the criminal act of persecution and analyze what factors cause the occurrence of criminal acts of persecution in Article 351 of the Criminal Code. This type of research is a type of juridical research. Normative juridical research is legal research that is carried out by examining library materials or mere secondary materials. The results of the study indicate that the normative juridical analysis of the criminal act of persecution in Article 351 paragraph 1 and Article 351 paragraph 2 of the Criminal Code, which is related to the juridical analysis of the criminal act of ordinary persecution, which is seen from the facts and reality as a result of the actions committed by the perpetrators causes feelings of discomfort. (suffering), the perpetrator must be found guilty of committing a crime of persecution. The punishment given is not retaliation but a deterrent effect for the perpetrator not to repeat his actions in the future. In relation to ordinary maltreatment, Article 351 of the Criminal Code can be charged with a maximus sentence of 2 (two) years and 8 (eight) months.

Meanwhile, the factors that led to the occurrence of criminal acts of persecution were because they prohibited the defendant's child from seeing the victim's witness

INDRA SETIAWAN

who was sitting on the terrace of witness Sasta's house, hearing the story of his child being treated badly by the victim's witness, then the defendant felt emotional, and the defendant went straight into the house. the defendant to take 1 (one) machete with a length of 50cm with a wooden handle tied with black rubber from behind the door of the defendant's house and the defendant immediately took the machete using his right hand.

Keyword: Opinions,Judges, Serious Injuries, Crimes, and mistreatment.